

2017

PRESS RELEASE GERAKAN



HENTIKAN RENCANA PENGUASAAN DISTRIBUSI WARUNG RAKYAT OLEH RITEL MODERN

Dipersiapkan oleh:

Gerakan Koperasi/ Koperasi dan Elemen

Masyarakat Sipil Lainnya

9/25/2017

PRESS RELEASE
GERAKAN KOPERASI/ KOPERASI BERSAMA SELURUH
ELEMEN MASYARAKAT SIPIL

HENTIKAN RENCANA PENGUASAAN DISTRIBUSI WARUNG
RAKYAT OLEH RITEL MODERN

PENGANTAR

Dalam pemberitaan *Detik.com* (19 September 2017) Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita rencana akan menerapkan kebijakan dimana ritel-ritel modern boleh salurkan barang ke warung-warung tradisional. Sumber berita: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3650400/mendag-gandeng-toko-ritel-modern-pasok-barang-ke-warung>

Kebijakan itu rencana akan diberlakukan mulai Oktober 2017 mendatang. Alasannya agar warung memperoleh harga yang murah karena langsung memperoleh barang dari distributor besar. Untuk kebijakan tersebut, Mendag rencana akan menggandeng peritel besar seperti Alfamart, Indomaret dan Hypermart yang jaringan gerainya tersebar dimana-mana.

Kebijakan tersebut nampak menolong warung tradisional dan masyarakat sebagai konsumen. Namun sesungguhnya dengan kebijakan tersebut, Mendag justru memuluskan jalan bagi ritel-ritel modern untuk mengkooptasi warung-warung tradisional melalui skema distribusi barang. **Analisisnya sebagai berikut:**

1. Selama ini keberadaan pasar dan ritel/ warung tradisional tergerus dengan massifnya ritel modern berjejaring di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian pada tahun 2007 dan Kementerian Perdagangan pada tahun 2011 jumlah pasar tradisional di Indonesia mengalami penurunan cukup drastis dari tahun 2007-2011. Pada tahun 2007, jumlah pasar tradisional di Indonesia mencapai 13.450. Tapi pada tahun 2011, jumlahnya tinggal 9.950. Di sisi lain Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) juga merilis kenaikan jumlah retail modern yang cukup signifikan tahun 2007-2011. Kenaikannya hampir delapan ribu retail modern. Jadi, pasar tradisional mengalami penurunan lebih dari tiga ribu, sedangkan pasar modern mengalami kenaikan sekitar delapan ribu.
2. Tergerusnya pasar dan ritel/ warung tradisional disikapi oleh berbagai Pemerintah Daerah (Pemda) dengan melakukan moratorium pendirian ritel modern khususnya skala mini market. Beberapa kota yang melakukan moratorium seperti: Kab. Banyumas, Kab. Sumenep, Kab. Sukoharjo, Kab. Kuningan, Kab. Bogor, Kab. Sragen, Kab. Pangandaran dan berbagai kota/ kabupaten lain di Indonesia.
3. Ditambah Pemerintah Pusat melakukan pembatasan pemilikan ritel modern yang melakukan penambahan jaringan. Dimana 40 persen harus dimiliki oleh masyarakat selaku pemawara laba yang akan dimasukkan dalam revisi Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan Pasar Modern dan Tradisional.
4. Kebijakan-kebijakan tersebut membuat ritel modern berjejaring tidak bisa menambah toko yang secara mandiri dimilikinya. Hasilnya adalah mereka membuat strategi berbeda: distribusi barang. Darah dari bisnis ritel adalah *turn over* barang atau tingkat penjualan produk suatu toko. Sehingga toko sekedar ruang pajang (*display*) bagi produk-produk tersebut. Dengan cara demikian, distribusi produk ritel modern ke warung tradisional sama dengan melakukan kooptasi pasar tradisional.

5. Dengan dukungan jalur distribusi dan sistem yang modern, kooptasi tersebut akan berdampak sistemik secara jangka panjang dimana pasar tradisional akan semakin tergerus omsetnya. Sedangkan bagi pemilik warung tradisional, kooptasi hanya memposisikan mereka sebagai gerai mini dari ritel modern. Masyarakat mungkin akan menikmati harga yang lebih kompetitif dari skema distribusi tersebut.

6. **Dampak kooptasi melalui dominasi jalur distribusi ritel modern ke warung tradisional adalah:**
 - a. Terjadinya *capital out flow* besar-besaran dari pasaran rakyat ke pasaran modern. Yang artinya sama dengan terjadinya *capital out flow* dari desa ke kota (Pusat) karena ritel-ritel pemasok merupakan pengusaha besar nasional.
 - b. Makin terkonsentrasinya modal di Pusat yang justru akan semakin memperlebar ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia sekarang ini.
 - c. Secara jangka panjang menghilangkan keragaman produk di pasaran rakyat karena skema distribusi menuntut efisiensi pengadaan produk.
 - d. Terjadi monopoli pasar oleh beberapa pengusaha ritel besar karena kapasitas jalur distribusinya dan hal itu melanggar UU Persaingan Usaha.
 - e. Monopoli pasar dan konsentrasi modal secara jangka panjang akan membuat swadaya dan kemandirian lokal menjadi hilang. Usaha rakyat sebagai benteng-benteng ekonomi lokal tergerus dan dapat terpengaruh langsung oleh fluktuasi ekonomi global akibat kooptasi jalur distribusi.
 - f. Mematikan koperasi-koperasi yang menyelenggarakan ritel sebagai bentuk ekonomi kolektif yang hidup di masyarakat.

Untuk itu kami mendesak Pemerintah (Cq. Menteri Perdagangan dan Menteri Koperasi) untuk:

1. Menghentikan kebijakan kooptasi/ penguasaan distribusi barang ritel modern ke warung tradisional.

2. Membatasi pembukaan toko-toko ritel modern oleh jejaring ritel nasional karena terbukti telah menggerus dan mematikan pasar tradisional, warung tradisional dan toko-toko koperasi yang dimiliki masyarakat.

3. **Mendukung pembangunan sekunder dan primer koperasi konsumen serta koperasi pasar secara massif di berbagai daerah sebagai cara mengintegrasikan jalur distribusi barang ke warung tradisional dengan alasan:**
 - a. Pemilik warung adalah anggota dari koperasi konsumen atau koperasi pasar sehingga pemilik warung juga akan memperoleh *revenue sharing* dari proses distribusi barang tersebut selain memperoleh harga kulakan yang lebih kompetitif.
 - b. Warung-warung tradisional yang terintegrasi dengan koperasi akan memperoleh pendampingan sosial-ekonomi-budaya sebagai kewajiban inheren koperasi. Bukan bisnis semata yang hanya berbentuk aliran barang dan uang saja.
 - c. Integrasi pasar ritel melalui koperasi-koperasi lokal tidak akan membuat *capital out flow* terjadi dari desa ke kota atau dari pinggiran ke pusat karena perusahaan dan bisnis koperasi bersifat redistributif bagi anggota dan masyarakat.
 - d. Koperasi bersama masyarakat lokal lebih mampu menjaga keragaman barang termasuk barang-barang produksi masyarakat setempat.
 - e. Melalui koperasi, demokrasi ekonomi sebagaimana Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 benar-benar akan terwujud karena koperasi menjamin tata milik, tata kelola dan tata distribusi dari, oleh dan untuk masyarakat.
 - f. Dengan model redistributifnya, koperasi merupakan instrumen efektif untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang saat ini terjadi di Indonesia. Dimana hal itu diakui oleh Ekonom Internasional Joseph Stiglitz dalam *International Cooperative Summit* 2016 lalu di Quebec, koperasi dapat diperankan sebagai alternatif instrumen *trickle-down effect* yang gagal dilakukan oleh korporasi swasta.

PENUTUP

Liberalisasi di seluruh sektor perekonomian secara jangka panjang akan membuat perekonomian Indonesia rapuh. Negara harus hadir dengan regulasi dan kebijakan yang tepat dan mendukung terutama dan yang utama bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Kebijakan afirmasi tersebut sangat dibutuhkan mengingat struktur pelaku ekonomi saat ini didominasi oleh skala mikro dan kecil yang jumlahnya 59 juta yang menyerap tenaga kerja mencapai 107 juta atau sebanyak 96,71 persen dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 61,41 persen (2016).

Komitmen sejati Pemerintah kepada demokrasi ekonomi harus diperkuat dengan mendorong melalui regulasi dan kebijakan bagi tumbuh dan berkembangnya koperasi-koperasi skala menengah dan besar di seluruh sektor perekonomian, termasuk sektor ritel di Indonesia. Pengalaman NTUC Fairprice Singapore dimana koperasi konsumen dapat menguasai 65 persen pangsa pasar dapat menjadi rujukan yang bisa diadaptasi kisah suksesnya di Indonesia.

Negara harus hadir dengan cara-cara yang tepat sehingga bukan sekedar populisme kebijakan yang bermata dua dan secara jangka panjang justru berbahaya bagi kemandirian dan ketahanan ekonomi nasional. Menteri Perdagangan harus menghentikan kebijakan tersebut di atas sekarang juga!

Kami gerakan koperasi bersama seluruh elemen masyarakat sipil:

1. **Firdaus Putra, HC.** | Direktur Kopkun Institute, Purwokerto
2. **Sri Untari Bisowarno** | Ketua Koperasi Setia Budi Wanita (SBW), Malang
3. **Sharmila** | Ketua Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia (INKOWAPI), Jakarta
4. **Dr. Walid** | Ketua Pusat Koperasi Konsumen Anugerah Damandiri Sejahtera (Puskopen ADS), Semarang
5. **Ilham Nasai, S.Sos.** | Ketua Lembaga Studi dan Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I), Jakarta
6. **Agung Sudjatmoko** | Ketua Harian Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN), Jakarta

7. **Henut Hendro, SE. dan Khairul Bakrie** | Pimpinan Cabang Bidang Ekonomi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Bekasi
8. **Slamet Fitriono** | PC Serikat Pekerja Automotive Mesin dan Komponen (SPAMK) FSPMI, Bekasi
9. **Arsad Dalimunte, HC.** | Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Banyumas
10. **Vincentius Arnold** | Sekjen Yayasan Transformasi Indonesia Sejahtera, Sekretaris Asosiasi Aren Indonesia DPW Jawa Barat
11. **Rofi Mustaghfiri** | Kopma UNY, Yogyakarta
12. **Herliana, HC.** | Ketua Koperasi Karya Utama Nusantara (Kopkun), Purwokerto
13. **Berliana** | Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Banyumas
14. **Irwan Saputro** | Ketua IIBF, Banyumas
15. **Taufik Budi, MSi.** | Akademisi UNSOED, Purwokerto
16. **Eka Setya Dian** | Ketua Badan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Koperasi Mahasiswa Indonesia (FKKMI), Jakarta
17. **Pendi Yusup Muchtar** | Ketua Umum Koperasi Pemuda Indonesia (KOPINDO), Jakarta
18. **Suroto, HC.** | Ketua Asosiasi Kader Sosio Ekonomi Strategis (AKSES) Indonesia, Jakarta
19. **Marthin Hadiwinata** | Ketua Dewan Pengurus Pusat/ Pelaksana Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)
20. **Rachmi Hertanti** | Indonesia for Global Justice (IGJ), Jakarta
21. **Dicky Naufal Rizaldi** | Ketua Umum Koperasi Mahasiswa Universitas Siliwangi
22. **Angga Bhakti Kusuma** | Ketua BKPK Jawa Barat
23. **Muhamad Iman Triaji** | Anggota KOPMA STIAMI, Jakarta
24. **Dodi Faedlulloh** | Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
25. **Aef Nandi Setiawan, HC.** | Wasekum bidang SDA Badko HMI Jateng - DIY
26. **Ali Sofiyon** | Ketua Umum Koperasi Mahasiswa STAIN Kudus
27. **Abdul Karim** | Ketua BKPK Jawa Timur
28. **Faqih Asyikin** | Koperasi Mitra Malabar Jawa Barat
29. **Drs.Ec.Tri Harsono** | Ketua Puskopkar Jawa Timur
30. **Priono** | Warta Koperasi, Jakarta
31. **Muhamad Adib** | Pengelola Sekolah Kader Desa Brilian Purwokerto
32. **Isman Rahadi** | Ketua Koperasi Pasar Manis (KOPAMAS), Banyumas
33. **Rudi Kurniawan, M.T.,** | Dosen & WK III Bid. Kemahasiswaan & Kemitraan STMIK "AMIK BANDUNG"
34. **Dudung Abdul Gopar** | Kabid. Ekonomi & Kewirausahaan Keluarga Alumni Pon Pes Al Mutawally (KAPPA)
35. **Tuti Trikaningsih** | Sekretaris BKPK Jawa Barat
36. **Ina Sriwahyuni** | Ketua Bidang Ekonomi MUSHIDA, Depok
37. **V. Parlindungan Sihotang** | GM Credit Union Cikalmas

38. **Asep Sholih Hudin** | Ketua Umum Kopma BS UPI, Bandung
39. **Asrul Raman** | Pusat Studi Desa, Demokrasi dan Kependudukan NTB
40. **Jaenal Arifin** | Sekjend Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia (HGKNI) Prov. Jawa Timur
41. **Susilo Eko Prayitno** | Manajer Koperasi Mitra Sejahtera, Cianjur
42. **Tulus Setiono, S Kep. MPH** | Ketua KPRI "NEU" RSUD Banyumas
43. **Nano** | KSP Kopdit SAE, Banyumas
44. **Bimo Ario Suryandaru** | Koperasi Trisaksi Bhakti Pertiwi (KOSKATI), Jakarta
45. **Asep Syamsudin** | Direktur Koperasi Mahasiwa Unisba
46. **Hardiyati** | Ketua KOWAPI Banyumas
47. **Sukari** | KUD Rukun Santoso, Rembang
48. **Yawingun** | Wakil Ketua Dekopinda Kota Semarang

Contact Person:

1. **Sharmila**, Ketua INKOWAPI, Jakarta - 0812-8139-8112
2. **Firdaus Putra, HC.**, Direktur Kopkun Institute, Purwokerto - 0821-3492-1369
3. **Sri Untari Bisowarno**, Ketua SBW, Malang - 0812-3288-1263
4. **Agung Sudjatmoko**, Ketua Dekopin, Jakarta - 0813-9904-5855
5. **Pendy Yusup**, Ketua KOPINDO, Jakarta - 0821-2151-2345

LAMPIRAN BERITA

Tangerang - Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita meminta pengusaha ritel modern menyalurkan barang-barang ke warung. Kebijakan ini menurutnya untuk membantu warung mendapat akses barang dengan harga terjangkau.

"Semua yang bergerak di pasar modern harus bisa berkontribusi untuk bisa bersama dengan pedagang tradisional dan warung," kata Enggartiasto kepada wartawan saat berkunjung ke Lippo Logistic Center di Balaraja, Tangerang, Selasa (19/9/2017).

Dia menjelaskan, pihak toko ritel modern bersama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) akan menyalurkan barang ke warung dengan harga terjangkau. Toko ritel modern seperti Alfamart, Indomaret, dan Hypermart, sudah menggelar pertemuan menyikapi rencana tersebut.

Menurut Enggartiasto, Aprindo sedang menyiapkan pola distribusi barang hingga sampai ke warung. Secara garis besar, akan dibuat kelompok distribusi menjadi dua dan membuat keanggotaan.

Kelompok pertama seperti Alfamart dan Indomaret karena memiliki ribuan gerai, dan kelompok kedua seperti Hypermart, Hero, Carefour dan Transmart.

"Mereka (warung) perlu dibantu mendapatkan akses barang dengan murah. Tujuannya supaya pembangunan berkeadilan dan merata," ucap pria yang akrab disapa Enggar itu.

Kebijakan ini, rencananya akan selesai tidak dalam waktu lama. Menurut Enggar, pada Oktober bisa segera diberlakukan. Selain untuk memotong mata rantai distribusi dan akses murah bagi pedagang warung tradisional, konsumen juga menurutnya dapat diuntungkan **(bri/hns)**

Sumber berita: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3650400/mendag-gandeng-toko-ritel-modern-pasok-barang-ke-warung>